

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2015.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Tahun 2015 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RENSTRA Tahun 2013 - 2018. LKj Tahun 2015 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang dijabarkan dari Rencana Strategis Tahun 2013 – 2015).

LKj Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Tahun 2015 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi pada tahun 2015, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Tahun 2015 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Tahun 2015 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Makassar,      Februari 2016  
KEPALA BADAN,



**Hj. ANDI MURLINA PA, S. Sos**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP        : 19580602 197812 2 001

## **Ikhtisar Eksekutif**

Pelaporan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebanyak 6 (enam) indikator dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang realisasinya dibawah 100% .

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB. I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	5
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	11
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA .....	27
B. REALISASI ANGGARAN .....	43
BAB. IV PENUTUP .....	57

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB prov. Sulsel. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya tiga dua setelah tahun anggaran berakhir.

## **II. Maksud dan Tujuan**

LKj Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB . Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **III. Gambaran Umum Organisasi**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan (BPPKB) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Badan yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Selatan, yang merupakan penjabaran pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

## **A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPPKB PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **1. Kedudukan**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### **3. Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Keluarga Berencana meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraan;
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Sulsel sebagai berikut :

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan bertugas membantu Gubernur di bidang tugasnya; memimpin, membina dan melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan daerah; mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, bertugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan, dan dalam menyelenggarakan tugasnya itu Sekretariat berfungsi mengkoordinasi segala kegiatan BPPKB berupa kegiatan rutin dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan penyusunan rencana program masing-masing bidang yang berada dalam lingkup BPPKB mengkoordinasikan pengaturan struktural dan administrasi kepegawaian seluruh staf BPPKB mengkoordinasikan pengadministrasian surat-menyurat dan fungsi-fungsi kearsipan lainnya; mengkoordinasikan pengadministrasian berbagai inventaris kantor berupa barang/benda baik bergerak maupun tidak bergerak; dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi penatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan badan, serta fungsi-fungsi umum lainnya.

Dalam kegiatan sehari-hari Sekretaris BPPKB Provinsi Sulawesi Selatan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- c) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.

## **3. Bidang Pengarusutamaan Gender**

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan Fasilitasi kebijakan secara teknis operasional menyangkut Bidang Pengarusutamaan Gender.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yaitu :

- a) Sub Bidang Fasilitasi dan Mediasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pembinaan teknis menyangkut Fasilitasi dan Mediasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender;
- b) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pembinaan teknis menyangkut Fasilitasi kelembagaan Pengarusutamaan Gender.

#### **4. Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak**

Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan Fasilitasi Kebijakan secara teknis operasional menyangkut Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.

Di dalam melaksanakan kegiatan Kepala Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yaitu :

- a) Sub Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pembinaan teknis menyangkut Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b) Sub Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pembinaan teknis menyangkut Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan.

#### **5. Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kebijakan secara teknis operasional menyangkut Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Reproduksi serta Pemberdayaan Keluarga.

Di dalam melaksanakan kegiatannya, Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yaitu :



- a) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Reproduksi Remaja dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pembinaan teknis menyangkut Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Reproduksi Remaja;
- b) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pembinaan teknis menyangkut Pemberdayaan Keluarga.

**6. Bidang Keluarga Sejahtera**

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kebijakan secara teknis operasional menyangkut bidang penguatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta informasi kependudukan dan keluarga.

Di dalam melaksanakan kegiatannya, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yaitu :

- a) Sub Bidang Penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan teknis menyangkut Penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- b) Sub Bidang Informasi Kependudukan dan Keluarga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pembinaan teknis menyangkut Informasi Kependudukan dan Keluarga.

**B. KONDISI KEPEGAWAIAN**

Jumlah Personil Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Desember Tahun 2015 sebanyak 45 orang, terdiri dari :

**Tabel 1**  
**Klarifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	3	13	16
2	S1	6	21	27
3	D3	-	1	1
4	SLTA	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>35</b>	<b>45</b>

**Tabel 2**

### Klarifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/c	-	1	1
2	IV/b	1	4	5
3	IV/a	1	6	7
4	III/d	1	11	11
5	III/c	1	4	5
6	III/b	4	9	13
7	III/a	-	-	-
8	II/d	-	-	-
9	II/c	-	-	-
10	II/b	2	-	2
11	II/a	-	-	-
12	Tenaga Non PNS	3	5	8
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>40</b>	<b>53</b>

Tabel 3

### Klarifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	4	5
3	Eselon IV	1	11	12
4	Staf	7	20	29
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>36</b>	<b>45</b>

**BAB. II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. RENCANA STRATEGI DAN RENCANA KINERJA**

**A. VISI**

Secara konseptual Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, ditetapkan visi atau keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode renstra sesuai tupoksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2013 - 2018, yakni :

**“ KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DAN ANAK MENUJU  
KELUARGA BERKUALITAS”**

Dari visi di atas, ada 3 (tiga) makna yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender dan anak adalah gambaran tentang hasil perubahan pada masyarakat Sulsel melalui upaya pengarusutamaan gender, untuk mencapai persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosbud, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
2. Keadilan gender dan anak adalah gambaran tentang proses perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki, bagi anak perempuan dan anak laki-laki di Sulawesi Selatan dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan dan aspirasinya .
3. Keluarga berkualitas adalah gambaran tentang keluarga ideal yang dibentuk berdasarkan perkawinan yg sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju,

mandiri, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kpd Tuhan Yang Maha Esa

## B. MISI

Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan peran perempuan dan keluarga berencana di Sulawesi Selatan, melalui misi ( upaya yang dilaksanakan sesuai tupoksi untuk mencapai visi) BPPKB sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak
2. Mewujudkan keluarga berkualitas
3. Mendorong peningkatan kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB

## C. TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan , maka tujuan merupakan implemementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**TUJUAN**

No	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kemitraan dan jejaring kerja peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
		Meningkatkan peran para pihak dalam pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
2	Mewujudkan keluarga berkualitas	Meningkatkan kesertaan ber keluarga berencana
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
3	Mewujudkan tatakelola pelayanan organisasi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, dan capaian kinerja program

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5**

Tujuan , Indikator Kinerja, dan Target Kinerja awesi Selatan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kemitraan dan jejaring kerja peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase SKPD prov, pemkab/kota memenuhi 50% < prasyarat PUG	60%
	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	19 kab
Meningkatkan peran para pihak dalam pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %
Meningkatkan kesertaan ber keluarga berencana	Prevalensi KB Aktif	66%
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	14 %
Meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan BPPKB	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	A

#### D. SASARAN

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 6

## Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN SKPD	META INDIKATOR	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kemitraan dan jejaring kerja pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak										
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase SKPD prov, pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	Jumlah SKPD provinsi yg memenuhi 50% prasyarat PUG dibagi jumlah SKPD provinsi	%	N/A	20	30	40	50	60
		Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	Jml kab/kota yg mendeklarasikan menuju Kab/Kota Layak Anak	Kab/kota	N/A	3	3	4	4	5
Tujuan 2 . Meningkatkan peran para pihak dalam pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak										
2	Meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat tingkat provinsi yang aktif melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, social,budaya	lembaga	N/A	40	45	50	53	55
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yg dilayani dibagi jml korban perempuan	%	70	80	90	95	96	98
		Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	lembaga	N/A	N/A	N/A	40	45	50
Tujuan 3. Meningkatkan kesertaan berkeluarga berencana										
4	Meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	klp	N/A	30	30	30	30	30
5	Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB	Prevalensi KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	49%	54%	57 %	60%	63%	66%
Tujuan 4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga										

6	Menurunnya keluarga prasejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dibagi Jumlah Keluarga x 100%	%	14,39	14,08	14,05	14,03	14,02	14,00
Tujuan 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB										
7	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi umum, keuangan dan capaian kinerja program.	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	Predikat SAKIP BPPKB	Predikat	CC	B	BB	A	A	A

#### E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 sebagai berikut :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kemitraan dan jejaring kerja peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase SKPD prov, pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kab/kota layak anak
				Program Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di provinsi dan kab/kota
			Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak anak (PHA)	Cakupan ketersediaan data gender dan anak
2	Meningkatkan peran para pihak dalam pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat prov. yg aktif dalam pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi
				Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di ranah publik
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase layanan perlindungan perempuan korban tindak kekerasan	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga penyedia layanan yang dikembangkan dalam perlindungan perempuan



				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan SPM layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan
			Persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah lembaga layanan yang dikembangkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
			Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Cakupan advokasi dan publikasi di di kab/kota
				Program Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak
				Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml kec yang menerapkan model operasional BKB-Posyandu_PAUD holistik
3	Meningkatkan kesertaan berkeluarga berencana	Meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jml kelompok KRR yang dibentuk
		Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB	Prevalensi KB Aktif	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Prevalensi KB Aktif
				Program Keluarga Berencana	Prevalensi Peserta KB Aktif

				Program Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
4	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Menurunnya keluarga pra sejahtera	Persentase keluarga pra sejahtera	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	% Keluarga Prasejahtera
				Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	% peningkatan pembentukan kelompok bina keluarga di kab/kota
				Program Keluarga Sejahtera	Jumlah Model Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga
5	Meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan BPPKB	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi umum, keuangan dan capaian kinerja program.	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran pd BPPKB
				Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPKB
				Prog. Peningk. Pengembangan Sisem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja	Persentase Capaian kinerja Program Tahunan BPPKB

## F. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kegiatan tahunan (RKT) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Sulsel disusun mengacu pada dokumen Renstra BPPKB Tahun 2013-2018.

Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Rencana Kinerja Tahunan**

<b>SASARAN SRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET 2015</b>
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase SKPD prov, Pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	30 %
	Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	3 Kab.Kota
Meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan perempuan	45 %
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	90%
Meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	30 klp
Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB	Prevalensi KB Aktif	57%
Menurunnya keluarga prasejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	14,05
Meningkatnya kualitas manajemen administrasi umum, keuangan dan capaian kinerja program.	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	BB

**G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015**

**Tabel 8**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2015**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET 2015</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase SKPD prov, Pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	20 %	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>1.309.069.500,-</b>
			1. Pengembangan Kebijakan PUG	380.572.500,-
			2. Pengembangan dan penguatan Kelembagaan PUG	228.925.000,-
			3. Pelatihan PPRG	174.702.000,-
			4. Workshop Data Gender dan Anak	162.150.000,-
	Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	12,5 %	5. Pembinaan Kota Layak Anak	362.720.000,-
Meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan perempuan	40 %	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>238.650.000,-</b>

			1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perempuan	117.700.500
			2. Penguatan kapasitas Angkatan Kerja Perempuan	120.950.000,-
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	80%	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>401.973.000,-</b>
			1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	401.973.000,-
Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak			<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>540.307.000,-</b>
			1. Penguatan Kelembagaan Bina Keluarga TKI	108.452.000,-
			2. Penguatan partisipasi Anak Dalam Pembangunan	431.855.000,-
			<b>Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</b>	<b>401.400.000,-</b>

			1. Publikasi Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB, KS	261.600.000,-
			2. Pelatihan Calon Fasilitator Tumbuh Kembang Anak	139.800.000,-
			<b>Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD</b>	<b>94.500.000,-</b>
			1. Pembinaan dan penguatan kader bina balita	94.500.000,-
Meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	30	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>281.875.000,-</b>
			1. Pelatihan Calon Fasilitator Kespro Remaja	166.375.000,-
			2. Pembentukan Kelompok KRR Luar Sekolah	115.500.000,-
Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB	Prevalensi KB Aktif	54%	<b>Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	<b>311.450.000,-</b>
			1. Pelatihan Petugas Lini Lapangan KB	142.850.000,-
			2. Pelayanan Peserta KB baru di Daerah Tertinggal dan Terpencil	87.900.000,-
			3. Evaluasi Program KB bg Pengelola KB Kab/kota	80.700.000

Menurunnya keluarga prasejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	14,08	<b>Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	<b>483.400.000,-</b>	
			1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	146.800.000,-	
			2.		
			3. Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	107.100.000,-	
				4. Pembinaan P2WKSS dan GSI	229.500.000,-
				<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	
				1. Pembentukan dan pembinaan Kelompok LANSIA	165.200.000,-
				2. Pembentukan dan pembinaan Penyandang Disabilitas	92.175.000,-
Meningkatnya kualitas manajemen administrasi umum, keuangan dan capaian kinerja program.	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	BB	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>413.769.000,-</b>	
			1. Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.869.000	
			2. 2. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12.500.000,-	
			3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	289.600.000	
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD</b>	<b>1.389.142.860,-</b>	
			1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	437.935.500,-	
			2. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung, dan peralatan Kantor	288.205.500,-	

			3. Pengadaan pakaian Dinas, korpri, dan pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya	35.175.000,-
			4. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	29.025.000,-
			5. Pendidikan dan pelatihan formal	143.000.000,-
			6. Pengelolaan Perpustakaan, dokumentasi dan informasi	158.350.000,-
			7. Pengelolaan Keuangan BPPKB	
			8. Partispasi pameran pembangunan Tk. Prov. Sulsel	66.200.000,-
			<b>Prog. Peningk. Pengembangan Sisem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja</b>	<b>295.915.280,-</b>
			1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	48.210.280,-
			2. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPPKB	26.400.000,-
			3. Evaluasi Pembangunan PP dan PA di Sulsel	115.500.000,-
			4. Konsolidasi program Pembangunan PP dan KB	105.805.000,-



## H. INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Tabel 9**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN SKPD	META INDIKATOR	Satuan	2015
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase SKPD prov, pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	Jumlah SKPD provinsi yg memenuhi 50% prasyarat PUG dibagi jumlah SKPD provinsi	%	30
		Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	Jml kab/kota yg mendeklarasikan menuju Kab/Kota Layak Anak	Kab/kota	3
2	Meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat tingkat provinsi yang aktif melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi,	lembaga	45
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yg dilayani dibagi jml korban perempuan	%	90
		Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan	lembaga	N/A
4	Meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	klp	30
5	Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB	Prevalensi KB Aktif	Jumlah Peserta Program KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	60%

6	Menurunnya keluarga prasejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dibagi Jumlah Keluarga x 100%	%	14,05
7	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi umum, keuangan dan capaian kinerja program.	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	Predikat SAKIP BPPKB	Predikat	BB

## I. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2015 maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 10.250.721.565,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung . Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

**Tabel 10.**

### Rencana Belanja APBD Tahun 2015

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	3.831.894.425,-	37,38
2.	Belanja Langsung	6.418.827.140,-	62.62
Jumlah		10.250.721.565,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

### A.1. Capaian Indikator Kinerja 2015

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3 di atas selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Sulawesi Selatan untuk tahun 2015. Pencapaian Indikator tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
Persentase SKPD prov, Pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	30 %	30 %	100%	50%	60%
Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100%	19 Kab/Kota	31,58%
Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan	45 lembaga	45 lembaga	100%	55 lembaga	81,82%
Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	90%	90%	100%	90%	100%
Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak	3 klp	3 klp	100%	19 Kab/Kota	31,58%

Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	30 klp	30 klp	100%	150	20%
Prevalensi KB Aktif	57%	57%	100%	66%	86,36%
Persentase Keluarga Pra Sejahtera	14,05	14,05	100 %	14%	96,55%
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	BB	BB	100%	A	90%

Dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah pada tahun 2015 menunjukkan capaian 100%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

## A.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2014, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini :

INDIKATOR	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2015 terhadap Capaian 2014	Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
Persentase SKPD prov, Pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	%	30 %	20%	30 %	50%	60%
Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	Kab.Kota	3 Kab.Kota	3 Kab/kota	3 Kab.Kota	19 Kab/Kota	31,58%
Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan perempuan	Lembaga	45	40	45	55	81,82%

Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	%	90%	80%	90%	90%	100%
Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak	lembaga	3 Kab.Kota	3 Kab/kota	3 Kab.Kota	19 Kab/Kota	31,58%
Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	klp	30 klp	30 klp	30 klp	150	20%
Prevalensi KB Aktif	%	57%	54%	57%	66%	86,36%
Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	14,05	14,08%	14,05	14%	96,55%
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	Predikat	BB	CC	BB	A	90%

### A.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### Sasaran 1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

##### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1

No	Indikator	2015			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase SKPD prov, Pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	30 %	30%	100%	50%	60 %
2.	Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	3 Kab.Kota	3 Kab.Kota	100%	19 Kab/Kota	31,58%

Untuk tahun 2015, capaian kinerja menunjukkan kinerja yang tinggi. Capaian kinerja untuk indikator Persentase SKPD prov, Pemkab/kota memenuhi 50% < prasyarat PUG ini menyumbang sebanyak 30 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh upaya maksimal yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan stakeholders terkait. Hadirnya berbagai kebijakan teknis baik dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Kota menjadi bukti adanya komitmen untuk menghadirkan peraturan atau kebijakan untuk mendukung pengarusutmaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Dukungan program kegiatan terhadap Sasaran (1) dan Indikator (i) didukung oleh Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Keberhasilan program tersebut di dukung melalui pelaksanaan kegiatan :

- Pengembangan Kebijakan Pengarusutamaan Gender , dengan hasil Tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah ; Fasilitasi pendampingan penyusunan kebijakan teknis daerah , seperti hadirnya Rancangan Peraturan Daerah Bupati Toraja Utara tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Toraja Utara; Peraturan Bupati

Bulukumba tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender; Surat Edaran Sekretariat Daerah Tana Toraja Nomor 476/1078/XII/SETDA, tanggal 18 Desember 2015, perihal Penyusunan Program Kegiatan SKPD yang Responsif Gender Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016; dan Surat Edaran Bupati Jeneponto terkait PPRG/Data Gender dan Anak Kabupaten Jeneponto; dan mendorong hadirnya berbagai kebijakan teknis SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, antara lain: Surat Edaran Kepala Balitbangda Prov. Sulsel Nomor 070.1.3/03/Balitbangda, tanggal 2 Januari 2015, perihal Surat Edaran yang berisi instruksi untuk memperhatikan dan memasukkan variabel yang responsif gender, yaitu data terpilah antara laki-laki dan perempuan secara proporsional; Surat Edaran Kepala Satpol PP Prov. Sulsel Nomor 070.1.3/315.a/Sat.Pol.PP, tanggal 9 Juli 2015, perihal Implementasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif Gender; Nota Dinas Kepala Biro Bina Kesejahteraan Nomor 2089/B.Kesra/TU/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Himbuan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif Gender; Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 902/114/KEP/DK-UMKM Tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015; Surat Edaran Kepala Dinas Kehutanan Nomor 903/1078/V.1/DISHUT tanggal 3 Agustus 2015 perihal Focal Point PUG dan Penyusunan RKA-SKPD Responsif Gender Dinas Kehutanan Prov. Sulsel TA. 2016; Surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulsel tentang Data Terpilah/Implementasi PPRG di Dinas Pendapatan Daerah; dan Surat Edaran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulsel tentang Data Terpilah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- Kegiatan Pengembangan Kelembagaan PUG, melalui Pendampingan pengisian dokumen monitoring dan evaluasi PUG bagi 30 SKPD Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan 5 Kab/Kota (Luwu Timur, Maros, Soppeng, Pangkep, dan Makassar).
- Kegiatan Workshop penyusunan data gender dan anak , melalui : Fasilitasi Penyusunan Profil dan Data Terpilah Gender dan Anak bagi 10 SKPD lingkup Pemerintah Prov. Sulsel (Data Terpilah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,



Dinas Pertanian TPH, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Ketahanan Pangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD Sayang Rakyat, dan RSUD Haji ); dan 5 (lima) kab/kota ( Bantaeng, Bone, Lutra, Sinjai dan Selayar).

- Kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender , dengan hasil kegiatan tersedia 160 aparat perencana di tingkat Provinsi dan kabupaten kota (mewakili 40 SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel dan 3 (tiga) mewakili Pemerintah Kab. Sinjai. Lutim, dan Lutra) yang telah dilatih dalam pemahaman dan ketrampilan yang komprehensif tentang konsep, perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, sehingga mampu menggali isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten.

Selanjutnya , dukungan program kegiatan terhadap Sasaran (1) dan Indikator (2) didukung oleh Program yang sama yakni Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Dengan didukung melalui pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kabupaten Kota Layak Anak , dengan hasil :

- Tersedia 300 orang tenaga pendidik dan kependidikan, serta komite sekolah untuk penerapan model sekolah ramah anak pada Kabupaten Wajo, Maros, dan Sidrap.
- Tersedia tenaga petugas terlatih sebanyak 228 orang untuk Konvensi Hak Anak (KHA) Dalam Mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), pada Kabupaten Wajo, Maros, Sidrap, dan Provinsi.
- Pembinaan dan pendampingan kabupaten/kota untuk pencapaian 31 indikator kabupaten/kota layak anak untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha agar mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak ke dalam Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang peduli, sensitif dan memihak pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan khususnya di Kab. Bantaeng, Makassar, Gowa, Lutra, Enrekang, Sidrap, Maros, Tator

**Sasaran 2. Meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik.**

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2**

No	Indikator	2015			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan perempuan	45 lembaga	45 lembaga	100%	55%	81,82%

Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja tinggi. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 81,82% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sasaran ini dimaksudkan untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan, baik kapasitas kelembagaan, maupun per individu sebagai pendorong dan pemicu pengembangan dan peningkatan pengarusutamaan gender pada berbagai sektor.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, melalui kegiatan :

- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perempuan, dengan hasil kegiatan penguatan kapasitas kader partai politik di Enrekang dan Bantaeng untuk mempersiapkan diri berkompetisi dalam Pemilu mendatang
- Penguatan Kapasitas Angkatan Kerja Perempuan, dengan hasil kegiatan meningkatnya kapasitas 120 orang angkatan kerja di kabupaten Bone, Enrekang dan Jeneponto , dan mendorong hadirnya kebijakan/regulasi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan di 3 (tiga) kabupaten dimaksud.

### Sasaran 3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

#### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3

No	Indikator	2015			Target	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir RENSTRA	
1.	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	90%	90%	100%	90%	100%
2.	Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak	3	3	100%	19 Klp	31,58%

Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dipengaruhi oleh upaya maksimal yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan stakeholders terkait.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran (3) indikator (1) ini didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Keberhasilan program tersebut di dukung melalui pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan hasil kegiatan mendukung operasional layanan P2TP2A Prov. Sulsel, serta penguatan dan pengembangan fungsi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk korban kekerasan terus dilakukan baik di 24 kabupaten/kota. Operasional P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 telah melayani dan mendampingi 72 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pelaku maupun korban berasal dari berbagai daerah/lintas daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Sedangkan lembaga P2TP2A pada kabupaten/kota dan lembaga pemerhati serta lembaga hukum melayani sebanyak 1.899 kasus,

meliputi kekerasan Fisik 1.183 kasus; kekerasan Psikis 99 kasus; Kekerasan Seksual 315 orang; eksploitasi 34 kasus, Penelantaran 40 kasus, dan Kasus Lainnya termasuk Trafiking sebanyak 300 kasus. Penanganan kasus tersebut dilakukan pada Layanan P2TP2A Provinsi dan 23 Layanan P2TP2A di kabupaten/kota yang telah terbentuk.

Ketersediaan Layanan P2TP2A baik di tingkat provinsi maupun pada kabupaten/kota menyebabkan meningkatnya pelaporan/pengaduan kasus oleh masyarakat. Selain itu juga didukung dengan sosialisasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang makin intensif dan dilakukan oleh berbagai sektor sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya mendapatkan hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Data jumlah kasus menunjukkan bahwa pengaduan/pelaporan kasus pada tahun 2014 pada layanan P2TP2 provinsi sebanyak 36 kasus dan 1.679 pengaduan/pelaporan kasus pada layanan P2TP2A kabupaten/kota, lembaga pemerhati, serta lembaga hukum. Sedangkan tahun 2015 jumlah pengaduan/pelaporan kasus pada layanan P2TP2A provinsi meningkat sebanyak 72 kasus dan 1.899 pengaduan/pelaporan kasus yang berasal dari layanan P2TP2A kabupaten/kota, lembaga pemerhati, serta lembaga hukum.

Berdasarkan data di atas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB terus melakukan upaya peningkatan peran stakeholders terkait (Pemda, LSM, Toga, Toma dll) karena perlindungan perempuan dan anak merupakan *Cross Cutting Issue*. Intervensi yang dilakukan terdiri dari intervensi primer atau pencegahan berupa peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak baik melalui sosialisasi, advokasi, dan koordinasi di daerah, termasuk peningkatan kemampuan dan kapasitas pendampingan korban khususnya bagi petugas, aparat dan LSM Pemerhati Perempuan dan Anak. Intervensi sekunder atau pengurangan resiko bagi keluarga rentan, perbaikan kondisi wilayah yang rawan kekerasan, penciptaan lembaga pendidikan berkarakter dan bebas kekerasan dalam bentuk sekolah ramah anak, dan Intervensi Tersier atau penanganan dengan menyediakan berbagai layanan untuk perlindungan perempuan dan anak termasuk P2TP2A.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran (3) indikator (2) ini didukung oleh 3 (tiga) Program yakni Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan 2 (dua) kegiatan :

1. Kegiatan Penguatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

- Pengintegrasian Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Forum Anak Daerah pada 5 kota/kabupaten yakni : Kota Palopo, Kab.Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru dan Kabupaten Sidrap. Pelatihan ini dihadiri oleh sekitar 50 orang di masing-masing kab/kota.
- Pemilihan pengurus dan penyusunan rencana aksi Forum Anak Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk periode 2016-2017;
- Festival Forum Anak Sulawesi Selatan (FASS) di Kabupaten Bantaeng yang dihadiri sekitar 200 orang anak perwakilan dari 24 Forum Anak kab/kota serta pendamping.
- Fasilitasi keikutsertaan Forum Anak Sulawesi Selatan dan perwakilan Forum Anak Kabupaten/Kota untuk mengikuti Forum Anak Nasional (FAN) dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015 di Kota Bogor Jawa Barat
- Fasilitasi keikutsertaan Forum Anak Sulawesi Selatan/perwakilan Forum Anak Kabupaten/Kota untuk mengikuti pertemuan Kongres Anak Indonesia (KAI) Tahun 2015 di Kota Batu – Jawa Timur.
- Koordinasi, sinergitas, dan integrasi dengan SKPD/Unit Kerja terkait lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerhati Anak, Lembaga Keagamaan, Lembaga Pendidikan, dan dunia usaha dalam upaya melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- Koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian PP-PA terkait pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

2. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI) dengan hasil :

- Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Bina Keluarga TKI Tahun 2015 telah dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten yaitu : Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru dan Kabupaten Luwu Utara, Kegiatan Pelatihan ini menghadirkan 40 peserta dari Tenaga Kerja, Bappeda,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Tenaga Kerja, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan UKM, Kementerian agama, Kesejahteraan Rakyat, PKK, Camat dan Lurah (wilayah/kantong-kantong TKI), LSM Pemerhati Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Perindustrian dan Perdagangan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Dunia Usaha dan unsur-unsur lain yang terkait. Adapun pokok-pokok materi yang disampaikan adalah kebijakan Bina Keluarga TKI, Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Kerja BK.TKI, Kondisi Umum Kabupaten / Kota , dan Permasalahan Ketenagakerjaan di Daerah

Selanjutnya Program (2) yakni Program Pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak , dengan kegiatan

1. Publikasi Informasi Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, KB dan KS , dengan hasil kegiatan :
  - Tersusunya Bulletin Sakinah sebanyak 600 exemplar;
  - Tersusunya Buku Profil Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - Terkelolanya Data Terpilah melalui Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak tahun 2015 yang bersumber dari SKPD, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Yang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - Penyediaan Data dan Informasi lingkup BPPKB Provinsi Sulsel dalam rangka menunjang keterbukaan informasi Publik .
  - Terlaksananya Publikasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan kerjasama Radio Mercurius FM;
  - Pelatihan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dalam rangka mendorong dan memfasilitasi focal poin PUG SKPD untuk penerapan data terpilah dimasing masing SKPD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 37 orang
2. Kegiatan Pelatihan Calon Fasilitator Tumbuh Kembang Anak,dengan hasil kegiatan :
3. Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kader Bina Balita

#### Sasaran 4. Meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja

##### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4

No	Indikator	2015			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	30 klp	30 klp	100%	150	20%

Untuk tahun 2015, capaian kerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi . Capaian ini menyumbang sebanyak 20 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan bina keluarga untuk kelompok lansia, penyandang disabilitas , dan kelompok remaja luar sekolah guna peningkatan kemampuan dan keterampilan baik pengembangan diri dan kelompoknya sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh :

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Bina Keluarga TKI, dengan hasil kegiatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja, melalui kegiatan Pelatihan Calon Fasilitator Kespro Remaja, dengan hasil kegiatan tersedianya tenaga fasilitator kesehatan reproduksi remaja pendidik/konselor sebaya dalam mendukung peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja luar sekolah maupun remaja lain yang ada dilingkungan (Kab. Bone, Kab. Enrekang dan Kota Pare masing-masing 75 Orang).
- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, melalui kegiatan hasil kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Lansia dan Penyandang Disabilitas, dengan hasil terbentuknya 7 (tujuh) kelembagaan kelompok tersebut di Kab. Gowa, Jeneponto, Toraja utara dan Luwu Utara. Sedangkan untuk kelompok Penyandang Disabilitas di Kab. Pinrang. Barru dan Sidrap .

**Sasaran 5. Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB**

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5**

No	Indikator	2015			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prevalensi KB Aktif	57%	57%	100%	66%	86,36%

Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Capaian ini menyumbang sebanyak 96,55 % dari target pada akhir RENSTRA (2018).

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diarahkan untuk mendorong partisipasi stakeholders terkait untuk implementasi program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Sulawesi Selatan, dengan hasil yang dicapai ; telah dilatih 200 kader petugas lini lapangan yang tersebar di Kab. Palopo, Luwu, Sidrap dan Pinrang; melakukan layanan peserta program KB bagi sebanyak 400 orang Pasangan Usia Subur di daerah tertinggal dan terpencil yang tersebar di Kab. Lutim, Enrekang, Bone dan Tator; dan melakukan koordinasi antar stakeholders terkait (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/kota dan BKKBN Perwakilan Sulsel) terkait pencapaian target pembangunan program kependudukan dan keluarga berencana di Sulawesi Selatan



## Sasaran 6. Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera

### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

No	Indikator	2015			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase keluarga pra sejahtera	14,05	14,05	100	14%	96,55%

Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Capaian ini menyumbang sebanyak 96,55 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat di Desa/Kelurahan dimana perempuan sebagai penggeraknya.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, melalui kegiatan :

- Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dengan hasil kegiatan terbentuk Bina kelompok usaha ekonomi perempuan di Kab. Bantaeng dan Kab. Toraja Utara, masing-masing Kabupaten terbentuk 10 Kelompok yang terdiri dari 1 kelompok sebanyak 10 peserta, jadi jumlah keseluruhan output adalah jumlah kelompok ekonomi perempuan yang terbentuk dan terbina sebanyak 20 kelompok, dengan materi pengembangan potensi sumberdaya alam lokal guna peningkatan dan penguatan ekonomi keluarga
- Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah, dengan hasil kegiatan terbina remaja putus sekolah keluarga pra sejahtera di Kab. Bone dan Luwu ( 90 orang laki-laki dan 110 orang perempuan ). Masing-masing Kabupaten terbentuk 10 Kelompok yang terdiri dari 1 kelompok sebanyak 10 peserta, jadi jumlah keseluruhan output adalah jumlah kelompok remaja putus sekolah yang terbentuk dan terbina sebanyak 20 kelompok dan diharapkan agar para anggota kelompok binaan

mampu mengembangkan potensi sumberdaya alam lokal guna peningkatan dan penguatan ekonomi keluarga

- Pembinaan P2WKSS dan GSI, dengan hasil kegiatan penyusunan penggandaan pedoman P2WKSS TA.2015, rapat koordinasi lintas SKPD terkait di Kab/Kota se SulSel , melaksanakan pembinaan dan Evaluasi sebagai tahap akhir untuk mendapatkan peringkat pengelola terbaik dan terakhir melaksanakan pelaporan secara berkala

**Sasaran 7. Meningkatnya kualitas manajemen administrasi umum, keuangan dan capaian kinerja program.**

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7**

No	Indikator	2015			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	BB	BB	100%	A	90%

Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dipengaruhi oleh upaya maksimal yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan koordinasi dalam dan luar unit BPPKB, serta koordinasi dalam dan luar daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Sulawesi Selatan tahun 2015.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui kegiatan (1) Penyediaan Alat Tulis Kantor, (2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan (3) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

- Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, melalui kegiatan (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung , Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (3) Penyediaan Pakaian Dinas, Korpri dan Pakaian Kerja Lapangan beserta Perlengkapannya; (4) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu; (5) Pendidikan dan Pelatihan Formal; (5) Pengelolaan Perpustakaan , Dokumentasi dan Informasi; (6) Pengelolaan Keuangan BPPKB; (7) Partisipasi Pameran Pembangunan Tingkat Provinsi Sulsel.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD, melalui kegiatan : (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran; (2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPKB; (3) Evaluasi Pembangunan PP dan PA di Sulawesi Selatan; (4) Konsolidasi Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan KB .

## **B. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 92,67% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran (5) Meningkatnya kualitas manajemen program, dan keuangan dan ketersediaan sumberdaya aparatur, serta sarana dan prasarana (32,69%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran (3) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya aparatur dalam implementasi PUG di Provinsi dan Kab/kota (2,72%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek

program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

### Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase SKPD prov, Pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	30 %	30 %	100%	946.349.500,-	927.250.140,-	97,94%
		Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	3 Kab.Kota	3 Kab.Kota	100%	362.720.000,-	351.169.800,-	96,82%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan perempuan	45 lembaga	45 lembaga	100%	238.650.500,-	225.442.640,-	94,47%
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	90%	90%	100%	401.973.000,-	401.564.989,-	99,90%
		Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak	3 klp	3 klp	100%	1.036.207.000,-	1.011.051.036,-	97,57%
4.	Meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	30 klp	30 klp	100%	281.875.000,-	277.427.735,-	98,42%
5	Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB	Prevalensi KB aktif	57%	57%	100%	311.450.000,-	308.967.400,-	99,20%

6.	Menurunnya keluarga prasejahtera	Menurunnya Persentase Keluarga Pra sejahtera	14,05	14,05	100	740.775.000,-	723. 652.294,-	97,69%
7.	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi umum, keuangan dan	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	BB	BB	100%	2.098.827.140,-	1.721.589.272,-	82,03%

Selanjutnya, untuk pengukuran kinerja kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



















## 5. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas 7 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatnya ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan dibidang pengasuhan dan tumbuh kembang, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 96.82 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan anak, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 96.61%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase SKPD prov, Pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG	100%	97,94%	2,06
		Jumlah kab/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	100%	96,82%	3,18
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat layanan pemberdayaan perempuan	100%	94,47 %	5,53
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak	100%	99,90%	0,1

		Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak	100%	97,57%	2,43
4.	Meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk	100%	98,42%	1,58
5	Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB	Prevalensi KB Aktif	100%	99,20%	0,8
6.	Menurunnya keluarga prasejahtera	Menurunnya Persentase Keluarga Pra sejahtera	100	97,69%	2,31
7.	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi umum, keuangan dan capaian kinerja program.	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKB	100%	82,03%	17,97



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB .

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2015), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB pada tahun 2015 adalah sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2015, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ke depan khususnya terkait hadirnya UU 23 yang mengindasikan pendekatan program dan kegiatan harus sesuai pembagian urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana termaktub dalam lampiran undang-undang dimaksud.

Bagi instansi di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.















